



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA DUMAI**

# ***STATISTIK PENDIDIKAN***

**KOTA DUMAI**

# **2021**





# ***STATISTIK PENDIDIKAN***

KOTA DUMAI

# 2021



## Statistik Pendidikan Kota Dumai 2021

**ISBN.** :  
**No. Publikasi** :  
**Katalog** :  
**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : xi + 56 Halaman

### **Naskah:**

BPS Kota Dumai

### **Penyunting:**

BPS Kota Dumai

### **Gambar Kulit:**

BPS Kota Dumai

### **Diterbitkan oleh:**

© BPS Kota Dumai

### **Dicetak oleh:**

### **Sumber Ilustrasi**

*freepik.com*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## **Tim Penyusun**

**Penanggungjawab:**

Drs. Morhan Tambunan, MSi

**Penyunting:**

Drs. Morhan Tambunan, MSi

**Penulis:**

Siswiny Marito Octalya Br. Tambunan, SST, SE, MSi

**Pengolah data:**

Badan Pusat Statistik

**Pembuat Cover dan Infografis:**

Primavera Dian R., S.Stat

<https://dumaikota.bps.go.id>



## **Kata Pengantar**

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Statistik Pendidikan Kota Dumai 2021 memberikan gambaran kondisi pendidikan di Kota Dumai berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Dumai, Desember 2022

Kepala BPS Kota Dumai

**Morhan Tambunan**





## Daftar Isi

Tim Penyusun .....	iii
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xiii
Bab 1. Pendahuluan .....	1
Bab 2. Metodologi .....	9
Bab 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	15
Bab 4. Partisipasi Sekolah .....	25
Bab 5. Hasil dan Capaian Proses Pendidikan .....	35
Lampiran RSE .....	43
Daftar Pustaka .....	53



## Daftar Tabel

Tabel 3.1	Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.....	18
Tabel 3.2	Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.....	20
Tabel 3.3	Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.....	21
Tabel 3.4	Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021 .....	23
Tabel 3.5	Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.....	24
Tabel 4.1	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021 .....	28
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021 .....	29
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021.....	30
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021.....	31
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021.....	33
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi, 2019-2021.....	39

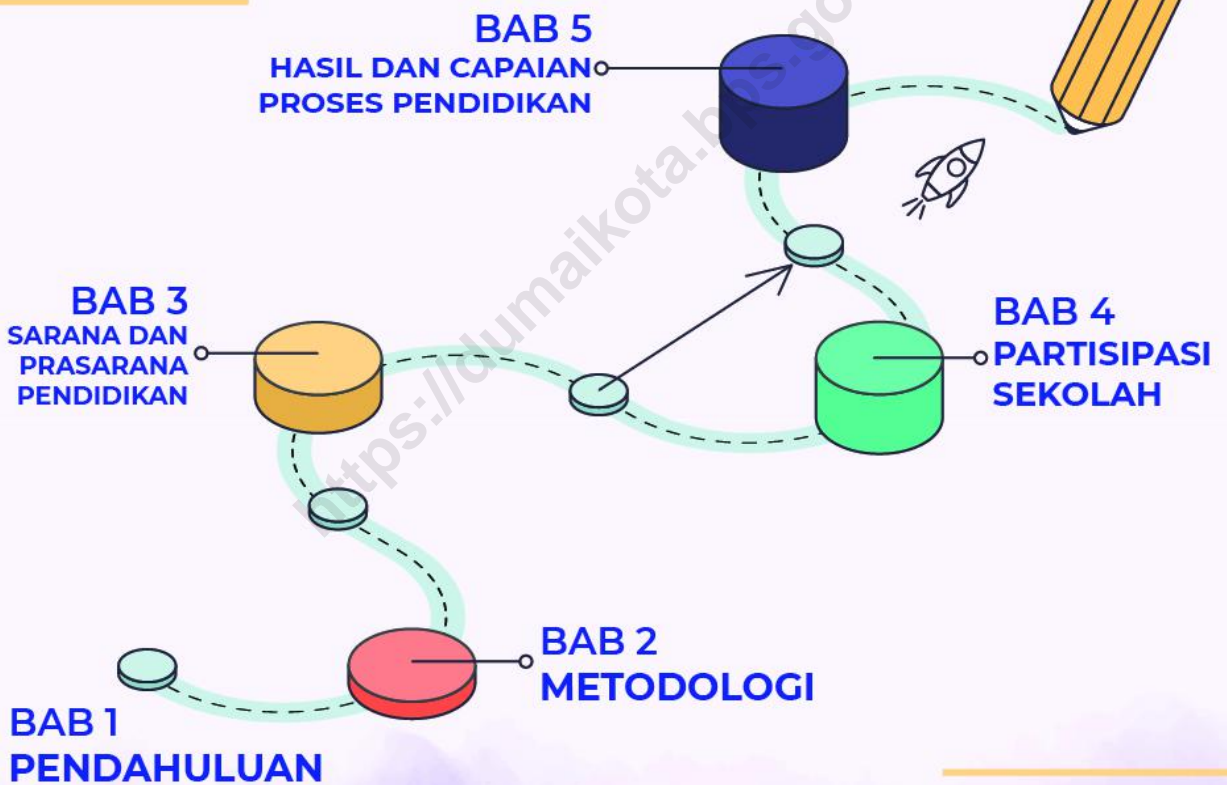


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2020/2021.....	19
Gambar 3.2 Persentase Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (MI, MTs dan MA) di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2020/2021.....	22
Gambar 4.1 APM Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai,2019-2021.....	32
Gambar 5.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai,2019-2021.....	38
Gambar 5.2 Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai,2019-2021.....	40



# BAB 1 PENDAHULUAN







## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

#### **Pendidikan di Masa Pandemi**

Sudah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak cukup fatal terhadap implementasi pembelajaran. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan di masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan beberapa kebijakan terkait proses belajar mengajar peserta didik, penilaian dan

penentuan kelulusan, serta penerimaan peserta didik baru agar dapat terlaksana tanpa adanya risiko yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik maupun pendidik.

Sejak pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020, peserta didik diminta untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, tidak hanya di Indonesia, menurunnya efektifitas PJJ juga terjadi di seluruh dunia (Kompas, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan karena minimnya konektivitas internet serta tidak adanya perangkat gawai untuk belajar secara *online*. Untuk mengantisipasi kondisi pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan terkait ketentuan penilaian serta kelulusan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

### **Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti**

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tepatnya pada tujuan ke-4 yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

### **Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan**

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil

capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia.

Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “Statistik Pendidikan Kota Dumai 2021”. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di Kota Dumai pada tahun 2021.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 serta data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021. Data-data yang disajikan didisagregasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan di Kota Dumai.

## **Sistematika Penulisan**

Secara sistematis Publikasi Statistik Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021 disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

### **Bab I**

Pendahuluan, yang menceritakan bagaimana gambaran pendidikan di masa pandemi, pembangunan pendidikan saat ini dan nanti, pentingnya data pendidikan sebagai monitoring pembagunan, serta sistematika penulisan dari publikasi.

### **Bab II**

Metodologi, memaparkan sumber data serta konsep dan definisi.

### **Bab III**

Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah, peserta didik, guru, serta rasio guru dan murid.

#### **Bab IV**

Partisipasi Sekolah, yaitu menampilkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

#### **Bab V**

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan Angka Melek Huruf, Kemampuan Membaca dan Menulis, dan Tingkat Pendidikan.

Selain itu, pada akhir bab juga akan disajikan hasil penghitungan *sampling error* guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.

<https://dumaikota.bps.go.id>

# BAB 2 METODOLOGI



*Sumber Data*

*Konsep dan  
Definisi*







## **Bab 2** **Metodologi**

### **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan publikasi Statistik Pendidikan Kota Dumai Tahun 2021 ini adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2019 sampai dengan 2021. Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas bila dibandingkan dengan survei-survei yang lain. Di dalam Susenas mencakup banyak data yang di antaranya adalah data pendidikan. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan data pendidikan lainnya, beberapa data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### **Konsep dan Definisi**

Konsep dan definisi diperlukan untuk menghindari cara pandang, persepsi maupun anggapan yang berbeda. Adapun konsep definisi yang digunakan dalam indikator pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bersekolah, adalah mendapat pendidikan atau pengajaran di sekolah. Dikatakan bersekolah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang formal maupun non formal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.
- b. Umur, adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan.
- c. Tidak/Belum pernah bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- d. Masih bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, yang berada di bawah pengawasan

Kemendikbud maupun kementerian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun institusi swasta. Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

- e. Tidak bersekolah lagi, adalah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (di bawah pengawasan Kemendikbud maupun kementerian lainnya), yang pada saat pendataan/survei sudah tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
- f. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).
- g. Pendidikan Non Formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
- h. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.
- i. Angka Melek Huruf (AMH), adalah proporsi penduduk usia tertentu yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya, terhadap kelompok penduduk usia tertentu. Angka ini digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai di suatu daerah, karena melek huruf (membaca dan menulis) merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$AMH = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APK = \frac{\text{Banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah proporsi dari semua anak pada suatu kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APS = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- i. Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya pddk usia sekolah tertentu yg sekolah pada jenjang yg sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- m. Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang yang ditamatkan.
- n. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
- SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
  - SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.
  - SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
  - PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.

# BAB 3



## Rasio Murid per Guru Jenjang Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2020/2021

**17,31**

Setiap 1 (satu) guru memiliki beban mengajar 17-18 murid pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun Ajaran 2020/2021 di Kota Dumai



### **Bab 3**

#### **Sarana dan Prasarana Pendidikan**

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

#### **3.1. Jumlah Sekolah**

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Salah satu upaya yang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru. Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu strategi percepatan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan.

Berdasarkan Tabel 3.1, terlihat bahwa hanya jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus swasta menunjukkan pertumbuhan positif sejak tahun ajaran 2019/2020 yaitu dengan bertambah 1 unit. Sedangkan prasarana sekolah lainnya yaitu Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berstatus negeri maupun swasta memiliki jumlah sekolah yang tetap sejak tahun ajaran 2018/2019 hingga tahun ajaran 2020/2021 termasuk juga Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus negeri.

Tabel 3.1.

Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

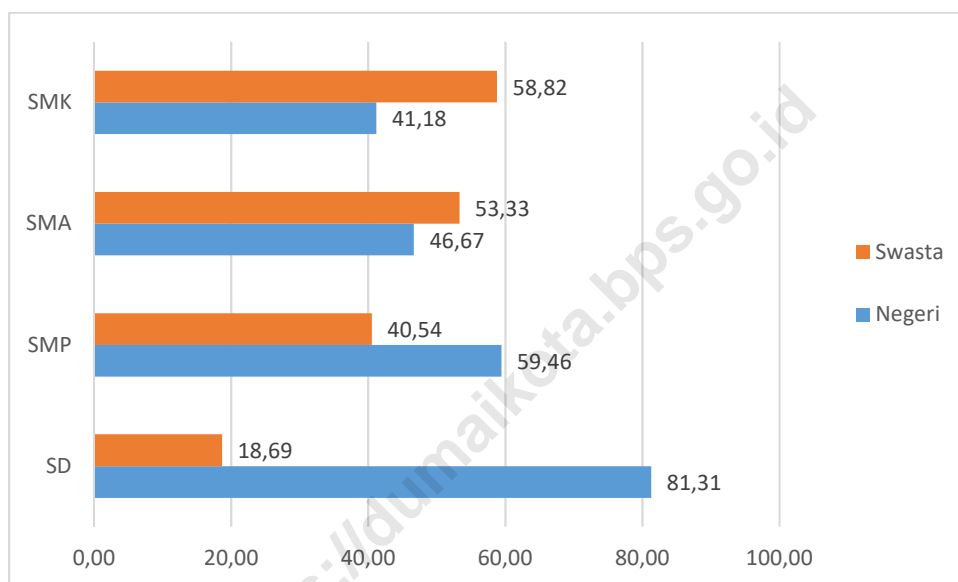
Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
Negeri	87	87	87
Swasta	20	20	20
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
Negeri	22	22	22
Swasta	14	15	15
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
Negeri	7	7	7
Swasta	8	8	8
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Negeri	7	7	7
Swasta	10	10	10

Sumber: Dumai Dalam Angka

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, penyelenggara pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas pemerintah saja, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat (swasta) untuk memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 3.1 memperlihatkan bahwa kontribusi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota Dumai cukup tinggi, khususnya



pada jenjang pendidikan menengah atas serta pendidikan menengah kejuruan. Persentase jumlah SMK negeri dibandingkan swasta cukup jauh perbedaannya yaitu 41,18 persen berbanding 58,82 persen, persentase jumlah SMA negeri dibandingkan swasta perbedaannya yaitu 44,67 persen dibanding 55,33 persen.



Sumber: Dumai Dalam Angka (diolah)

Gambar 3.1 Persentase Sekolah Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2020/2021

Selain sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga terdapat sekolah umum yang dikelola oleh Departemen Agama. Sekolah tersebut juga setingkat SD hingga setingkat SMA. Pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 di Kota Dumai terdapat 7 unit Madrasah Ibtidaiyah, 18 unit Madrasah Tsanawiyah dan 9 unit Madrasah Aliyah. Masing-masing jenjang Pendidikan tersebut juga ada yang berstatus sebagai sekolah negeri dan juga sekolah swasta.

**Tabel 3.2. Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021**

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Madrasah Ibtidaiyah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Negeri	1	1	1
Swasta	6	6	6
<b>Madrasah Tsanawiyah</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>
Negeri	2	2	2
Swasta	17	17	16
<b>Madrasah Aliyah</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Negeri	1	1	1
Swasta	8	8	8

**Sumber: Kementerian Agama Kota Dumai**

### 3.2 Jumlah Peserta Didik

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa peserta didik SMK tahun ajaran 2020/2021 di Kota Dumai lebih banyak jika dibandingkan dengan peserta didik SMA (sekitar 7 ribu siswa berbanding 6 ribu siswa). Hal tersebut menggambarkan tingginya minat peserta didik untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan. Langkah ini diharapkan dapat menjawab keinginan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja melalui lulusan-lulusan SMK sebagai tenaga kerja terampil dan memiliki daya saing dalam dunia kerja.

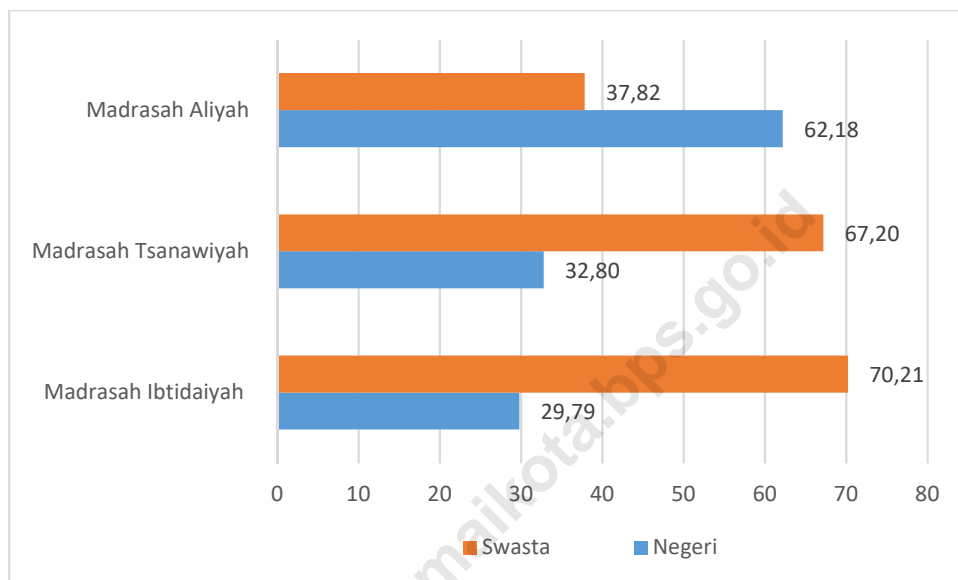
**Tabel 3.3. Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021**

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>65.687</b>	<b>38.835</b>	<b>38.416</b>
Negeri	32.802	32.885	32.296
Swasta	32.885	5.950	6.120
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>13.274</b>	<b>13.443</b>	<b>13.480</b>
Negeri	9.995	10.220	10.345
Swasta	3.279	3.223	3.135
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	<b>5.861</b>	<b>6.123</b>	<b>6.281</b>
Negeri	4.309	4.622	4.928
Swasta	1.552	1.501	1.353
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>6.963</b>	<b>7.429</b>	<b>7.741</b>
Negeri	4.810	5.200	5.696
Swasta	2.153	2.229	2.045

**Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Sebagian besar peserta didik bersekolah pada sekolah negeri daripada swasta. Pertimbangan biaya sekolah yang lebih rendah karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah menjadi salah satu daya tarik dari sekolah negeri. Peserta didik di sekolah negeri pada jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK lebih didominasi oleh sekolah negeri. Berbeda dengan sekolah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan,

untuk sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dikelola oleh pihak swasta di Kota Dumai lebih diminati daripada yang bersatus negeri pada tahun ajaran 2020/2021. (Grafik 3.2).



Gambar 3.2 Persentase Jumlah Peserta Didik Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan (MI, MTs dan MA) di Kota Dumai pada Tahun Ajaran 2020/2021

### 3.3 Beban Kerja Guru

Salah satu indikator untuk melihat pemerataan sarana dan prasarana pendidikan adalah rasio murid-guru. Angka ini mencerminkan rata-rata jumlah murid yang menjadi tanggung jawab seorang guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru dalam sebuah sekolah, berarti semakin mengurangi efektivitas proses pembelajaran karena tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid menjadi berkurang yang akan berpengaruh pada mutu pengajaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 17 menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan pada jenjang SMK idealnya satu

guru bertanggung jawab pada 15 murid. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, SMK rasio murid guru masih di bawah standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah.

**Tabel 3.4.** Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sekolah Dasar</b>	<b>31,38</b>	<b>18,23</b>	<b>17,31</b>
Negeri	18,51	18,18	17,43
Swasta	102,45	18,54	16,72
<b>Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>16,19</b>	<b>14,55</b>	<b>14,37</b>
Negeri	15,87	14,39	14,25
Swasta	17,26	15,06	14,79
<b>Sekolah Menengah Atas</b>	<b>15,51</b>	<b>15,35</b>	<b>14,15</b>
Negeri	16,20	15,94	15,59
Swasta	13,86	13,77	10,57
<b>Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>15,75</b>	<b>15,61</b>	<b>14,55</b>
Negeri	14,85	15,34	14,83
Swasta	18,25	16,27	13,82

**Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Diolah**

Rasio murid guru tingkat MI, MTs dan MA juga berada pada standar ideal tersebut. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5.

Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan (MI, MTs, dan MA) dan Status Sekolah di Kota Dumai, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Madrasah Ibtidaiyah</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Negeri	14	14	14
Swasta	12	13	13
<b>Madrasah Tsanawiyah</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Negeri	12	10	12
Swasta	10	9	9
<b>Madrasah Aliyah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Negeri	10	13	13
Swasta	5	4	4

Sumber: Kementerian Agama Kota Dumai, Diolah

Rasio murid-guru bukanlah faktor mutlak keberhasilan anak dalam proses belajar. Rasio murid-guru yang ideal akan bervariasi tergantung pada faktor lainnya. Rasio murid-guru di kelas tentunya akan proses belajar di kelas, tapi bukan satu satunya faktor penentu untuk meningkatkan kualitas belajar di kelas.

# BAB 4



**Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah Tahun 2021**







## **Bab 4**

### **Partisipasi Sekolah**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

COVID-19 telah menghantam stabilitas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pendidikan. Pengalihan metode pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi metode daring menyulitkan sejumlah kalangan. Efektivitas yang diragukan dari pembelajaran daring membuat sebagian orang menyerah dan akhirnya melepas bangku sekolah. Jika dalam kondisi normal saja *gap* kesempatan bersekolah antarkelompok besar, tentunya kondisi pandemi ini akan semakin mempersulit kelompok *vulnerable* dalam mengakses pendidikan.

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2019-2021 memperlihatkan hasil penghitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Bentuk peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah penduduk. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah.

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2021 persentase penduduk 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 3,29 persen; yang masih bersekolah sebesar 27,77 persen; dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 68,94 persen. Persentase penduduk laki-laki yang belum/tidak pernah bersekolah sedikit lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2021

Partisipasi Sekolah	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	2,42	4,19	3,29
Masih Bersekolah SD/Sederajat	14,63	13,97	14,31
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	6,23	4,60	5,43
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	7,44	8,67	8,03
Tidak Bersekolah Lagi	69,28	68,57	68,94

**Sumber:** BPS, Susenas Maret 2021

Penduduk usia sekolah 7-24 tahun memegang peranan penting dalam pembangunan. Keberhasilan pendidikan dengan terciptanya SDM unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi akan menjadi generasi harapan bangsa, *engine of growth*, dan lokomotif pembangunan. Usia 7-24 tahun merupakan rentang usia

sekolah, hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif melakukan kegiatan bersekolah tanpa terkecuali.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021

Partisipasi Sekolah	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,06	0,38	0,21
Masih Bersekolah SD/Sederajat	38,13	37,79	37,97
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	17,32	13,67	15,59
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	19,61	24,50	21,92
Tidak Bersekolah Lagi	24,88	23,66	24,31

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada table 4.2. menunjukkan masih terdapat penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah di Kota Dumai pada tahun 2021. Penduduk perempuan usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah memiliki persentase yang lebih tinggi dari pada Penduduk laki-laki usia 7-24 tahun.

#### 4.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan

penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa APS terbesar berada pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,53 persen atau dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, APS semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya cenderung semakin menurun.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021

Kelompok Umur	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 Tahun	100,00	99,01	99,53
13 - 15 Tahun	99,07	94,53	97,26
16 - 18 Tahun	70,66	81,07	76,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

#### 4.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika jumlah populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya siswa yang

masuk suatu jenjang sekolah terlalu dini dibandingkan usianya, atau sebaliknya, lebih lambat dibandingkan usianya, serta adanya pengulangan kelas oleh siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	106,70	107,43	107,05
SMP	90,22	95,48	92,32
SMA	103,48	98,85	101,11

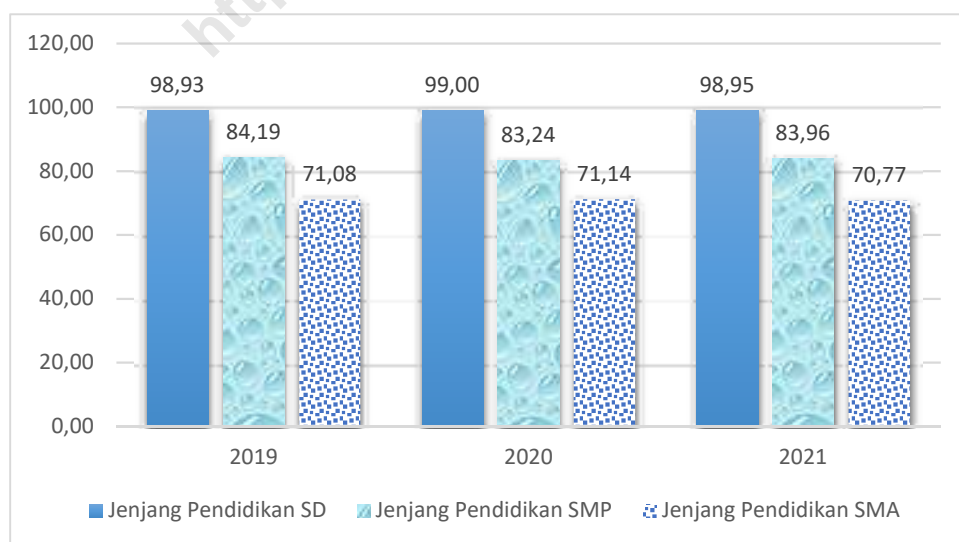
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Tabel 4.4 memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD sampai SMA. APK jenjang pendidikan SD sebesar 107,05 persen, APK SMP sebesar 92,32 persen dan APK SMA sebesar 101,11 persen. APK pada jenjang pendidikan SD melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar kelompok umur 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia 7-12 tahun. Banyak hal bisa menjadi alasan, antara lain beberapa orang tua terkadang mendaftarkan anaknya yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, angka mengulang kelas yang masih tinggi, dan sebagainya.

Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Seharusnya sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan di Indonesia seperti yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu. APK laki-laki dan perempuan di Kota Dumai untuk tingkat SD sederajat hampir tidak terdapat perbedaan. Namun, pada jenjang SMP, APK SMP perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada jenjang SMA, APK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

#### 4.2 Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.



Gambar 4.1 APM Menurut Status Sekolah dan Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2019-2021

Gambar 3.2 memperlihatkan APM jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai dengan APM jenjang SM/ sederajat. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 pola APM di Kota Dumai memiliki kemiripan dengan pola APK. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi yaitu 98,95 persen kemudian APM semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM jenjang pendidikan SMA laki-laki lebih rendah daripada APM perempuan.

Tabel 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100,00	97,80	98,95
SMP	83,73	84,31	83,96
SMA	63,74	77,44	70,77

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

<https://dumaikota.bps.go.id>



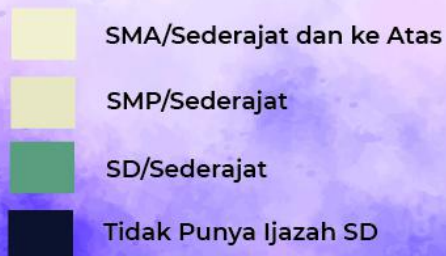
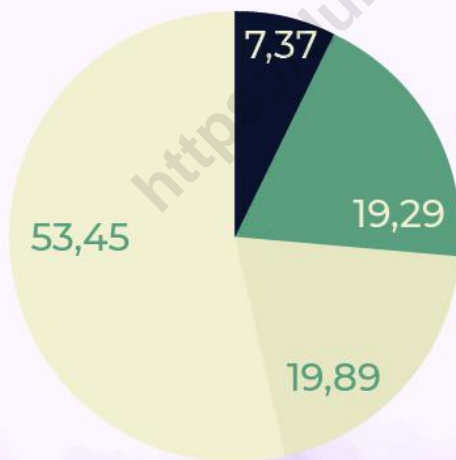
# BAB 5



## Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur

15-24 tahun	100
15-59 tahun	100
15+ tahun	99,30

## Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki





## **Bab 5**

### **Hasil dan Capaian Proses Pendidikan**

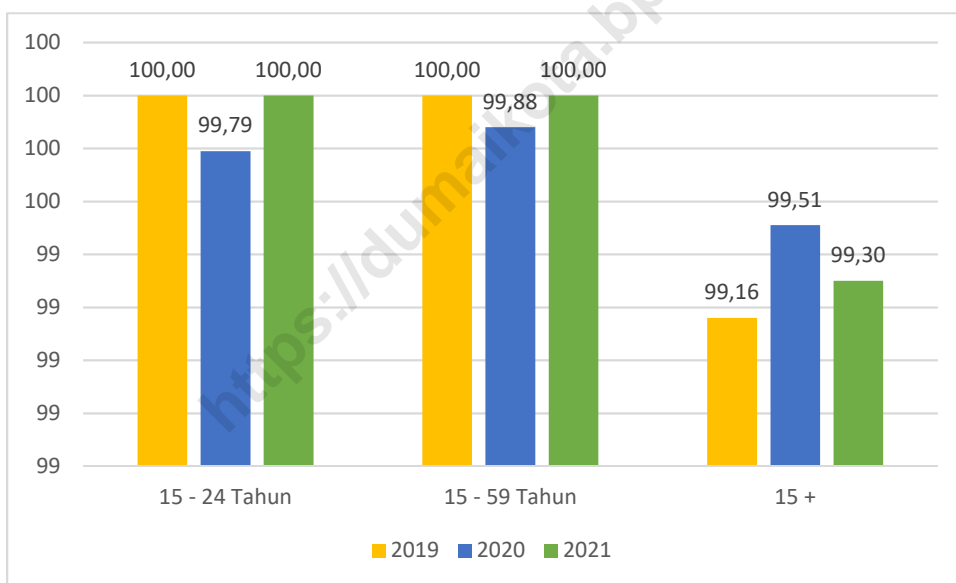
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua diharapkan dapat tercapai.

Bab ini mengulas beberapa capaian pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan yang bersumber dari Susenas 2019-2021. Capaian pendidikan dapat ditinjau dari Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Sejak 10 tahun terakhir, AMH digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

## 5.1 Angka Melek Huruf

Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Dengan kemampuan baca-tulis yang baik, maka akses terhadap pengetahuan semakin terbuka. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH dapat diinterpretasikan sebagai seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk membaca dan menulis sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pengetahuan dan keterampilan tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penduduk.



Gambar 5.1 Angka Melek Huruf (AMH) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2019-2021

Pada tahun 2021, AMH disetiap kelompok umur mengalami fluktuasi selama tahun 2019 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, angka melek umur kelompok umur 15 tahun keatas belum mencapai 100 persen. Hal ini mengindikasikan, terdapat penduduk yang berusia diatas 59 tahun, yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis.

## 5.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan penduduk Kota Dumai didominasi oleh pendidikan SMA/ sederajat dan ke Atas. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, 53 orang yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat dan ke Atas pada tahun 2021 di Kota Dumai (Tabel 5.1). pada tahun 2021 masih terdapat penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah SD yaitu sebesar 7,37 [persen].

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah Tertinggi, 2019-2021

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Punya Ijazah SD	9,95	8,28	7,37
SD/Sederajat	18,77	18,70	19,29
SMP/Sederajat	20,72	21,08	19,89
SMA/Sederajat dan ke Atas	50,56	51,95	53,45

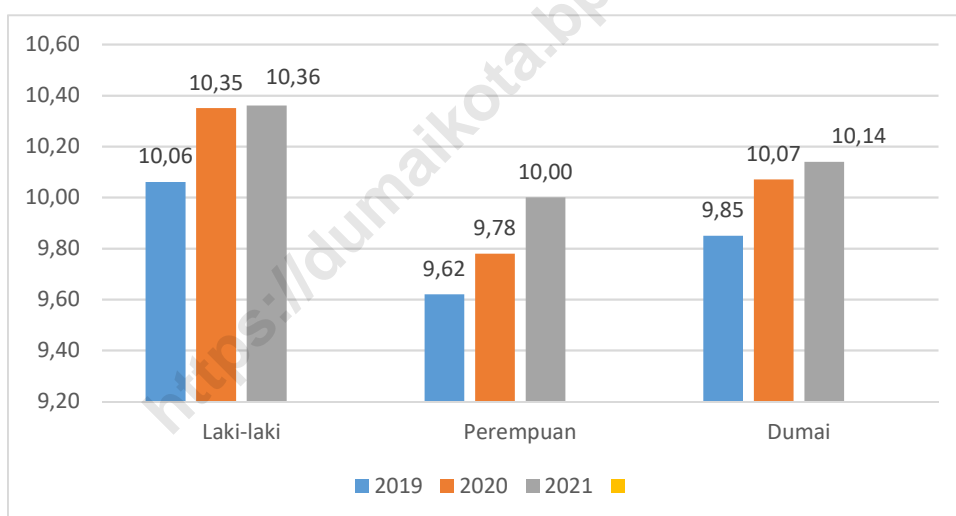
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

## 5.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator yang menjadi sasaran pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-

rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.



Gambar 5.2 Rata-rata Lama Sekolah menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai, 2019-2021

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2021 mencapai 10,14 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMA (kelas X) atau putus sekolah SMA (Kelas XI). Selama 3 tahun terakhir rata-rata lama sekolah Kota Dumai mengalami peningkatan walaupun belum signifikan, masih dikisaran 10 tahun. Kondisi ini menggambarkan

bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan.

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan peningkatan selama tahun 2019-2021. Perbedaan rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan juga tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan menunjukkan angka yang sama yaitu secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMA (kelas X) atau putus sekolah SMA (Kelas XI).

<https://dumaikota.bps.go.id>

<https://dumaikota.bps.go.id>



## ***Relatif Standard Error (RSE)***

digunakan untuk mengamati kualitas hasil estimasi survei.

**RSE  $\leq$  25% Data Akurat**

**25% < RSE  $\leq$  50% Hati-hati  
menggunakan data**

**RSE > 50% Dianggap tidak akurat**



## Hasil Penghitungan *Sampling Error*

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2019-2021. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

*Standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

**RSE  $\leq$  25%** dianggap **akurat**

**RSE  $>$  25% tetapi  $\leq$  50%** perlu **hati-hati** jika ingin digunakan

**RSE  $>$  50%** maka nilai estimasi tersebut dianggap **sangat tidak akurat**

Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menggabungkan estimasi tersebut dengan estimasi lain untuk mendapatkan nilai estimasi yang RSE-nya lebih kecil.

Tabel 6.1. *RSE* Persentase Penduduk yang Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) menurut Karakteristik dan Kelompok Umur, 2021

Karakteristik	Kelompok Umur	
	5 Tahun ke Atas	17 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	0,39	0,46
Perempuan	0,28	0,35
<b>Kelompok Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	0,56	0,74
40 Persen Tengah	0,25	0,32
20 Persen Teratas	0,00	0,00
<b>Pendidikan Tertinggi KRT</b>		
SD ke bawah	0,65	0,75
SMP ke atas	0,12	0,16
<b>Dumai</b>	<b>0,24</b>	<b>0,29</b>

**Tabel 6.2. RSE Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021**

Karakteristik	Huruf Latin	Huruf Lainnya*
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	0,36	2,17
Perempuan	0,39	1,96
<b>Kelompok Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	0,59	0,60
40 Persen Tengah	0,37	0,37
20 Persen Teratas	0,00	0,00
<b>Dumai</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>

\* Huruf lainnya yaitu selain huruf latin.

**Tabel 6.3. RSE Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021**

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	18,40	8,04	12,52	11,93	2,23
Perempuan	15,54	8,47	13,70	10,59	2,27
<b>Kelompok Pengeluaran</b>					
40Persen Terbawah	16,72	7,80	13,69	13,41	2,87
40Persen Tengah	19,39	9,60	14,27	12,03	2,40
20Persen Teratas	33,66	18,44	26,33	16,98	2,94
<b>Dumai</b>	<b>11,93</b>	<b>5,83</b>	<b>9,28</b>	<b>7,94</b>	<b>1,59</b>

Tabel 6.4. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan, 2021

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	100,09	6,94	11,75	11,22	9,44
Perempuan	99,78	7,38	13,17	9,92	10,65
<b>Kelompok Pengeluaran</b>					
40PersenTerbawah	100,10	6,57	13,12	12,75	10,48
40PersenTengah	99,72	8,34	13,49	11,27	10,93
20PersenTeratas	0,00	17,83	24,63	14,85	19,35
<b>Dumai</b>	<b>86,80</b>	<b>5,06</b>	<b>8,81</b>	<b>7,45</b>	<b>7,07</b>

Tabel 6.5. *RSE* Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk menurut Karakteristik dan Jenis Kelamin, 2021

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>APS</b>			
7 – 12 tahun	0,00	1,00	0,47
13 – 15 tahun	0,94	4,22	1,77
16 – 18 tahun	9,30	6,84	5,68
<b>APM</b>			
SD	0,00	1,24	0,58
SMP	5,28	6,58	4,11
SMA	10,77	7,46	6,40



**Tabel 6.6. RSE Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021**

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ ke atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	16,23	7,98	7,52	3,58
Perempuan	12,75	7,99	7,96	3,72
<b>Kelompok Pengeluaran</b>				
40 Persen Terbawah	14,48	7,57	7,76	5,60
40 Persen Tengah	15,68	9,18	8,69	3,79
20 Persen Teratas	28,70	17,63	15,25	3,98
<b>Dumai</b>	<b>10,06</b>	<b>5,65</b>	<b>5,47</b>	<b>2,58</b>

<https://dumaikota.bps.go.id>

## Daftar Pustaka

Bappenas (2020). METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA.

Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2021, 5 Januari. Kemendikbud Sampaikan Capaian Tahun 2020 dan Sasaran Tahun 2021. Diakses pada 15 November 2021, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/01/kemendikbudsampaikan-capaian-tahun-2020-dan-sasaran-tahun-2021>.

Badan Pusat Statistik, 2020. *Potret Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta: BPS

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2021*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2021. *Statistik Pendidikan Kabupaten Kebumen 2020*. Kebumen: BPS Kabupaten Kebumen.

Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2019*. Dumai: BPS Kota Dumai.

Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2020*. Dumai: BPS Kota Dumai.

Badan Pusat Statistik Kota Dumai, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2021*. Dumai: BPS Kota Dumai.

<https://dumaikota.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA DUMAI**

Jl. Tuanku Tambusai - Dumai

Telepon (0765) 4300005

Homepage : [dumaikota.bps.go.id](http://dumaikota.bps.go.id)

E-mail : [bps1473@bps.go.id](mailto:bps1473@bps.go.id)